

**Pengelolaan Arsip Statis
Kepresidenan Di Indonesia**
Presidential Archives' Management In Indonesia

Octavia Syafarwati
Arsip Nasional RI
Octavia.syafarwati@anri.go.id

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Arsip kepresidenan merupakan rekaman kegiatan peristiwa dan kegiatan sebagai representasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Presiden dan Wakil Presiden dan kegiatan perseorangan. Arsip kepresidenan sangat krusial untuk diselamatkan dan dikelola informasinya karena memiliki nilai memori kolektif bangsa. Diversifikasi mengenai konsep arsip kepresidenan, berdampak besar kepada kebijakan-kebijakan pengelolaan arsip statis kepresidenan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep-konsep dari arsip statis kepresidenan, dan strategi pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi mengenai penyelamatan dan pengelolaan arsip kepresidenan agar dapat menjadi inspirasi dan aspirasi bagi pengguna. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pembaca dalam pengelolaan arsip statis kepresidenan ataupun arsip statis para kepala daerah sehingga dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kata kunci: Arsip kepresidenan, Indonesia, arsip. Pengelolaan arsip statis, akuisisi/ penyelamatan

Abstract

Presidential archives are recorded events and/or activities that depict the functions and duties of presidents and vice-presidents and their personal activities. They have national collective memories; therefore, they are tremendously crucial to be acquired and managed. The diversification of the presidential archives' concept has a major impact on the policies of managing presidential archives. There are various concepts of presidential archives around the world. Indonesia, at present, attempts to manage presidential archives. This study scrutinizes the presidential archives' concepts, and strategies to manage them. In addition, it aims to contribute to encourage readers in managing presidential archives or regional leaders in Indonesia in order to inspire and aspire next generations.

Keywords: Presidential archives, Indonesia, archives, archives management, acquisitions.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Indonesia, 2009) MacNeil (2010) menganalogikan arsip sebagai situs memori kolektif. (*Currents of Archival Thinking*, 2010) Muller, Feith, dan Fruin (1940) berpendapat bahwa arsip tercipta sebagai hasil dari kegiatan dari lembaga pencipta, selain itu arsip juga merefleksikan fungsi dari lembaga pencipta. (Muller, 1968) Berdasarkan nilai informasi dari arsip, arsip terdiri atas arsip dinamis dan arsip statis.

Artherton (dalam Glenn Dingwall) berpendapat bahwa arsip statis (*archives*) adalah arsip dinamis (*records*) yang sudah digunakan oleh lembaga pencipta, tetapi memiliki nilai informasional kepada peneliti. (*Currents of Archival Thinking*, 2010) Definisi lain mengenai arsip statis dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis di Indonesia meliputi penyelamatan, Pengolahan, preservasi dan layanan serta pemanfaatan. (Indonesia, 2009) Arsip statis yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia dalam bentuk media tekstual, peta, gambar kearsitekturan, foto, film dan elektronik, berasal dari berbagai *provenance* yang terdiri atas lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan.

Society of American Archivist (SAA) mendefinisikan arsip kepresidenan (*presidential records*) sebagai arsip yang diciptakan oleh presiden ataupun organisasi pemerintah yang lainnya. (Montgomery, 2003) Istilah *presidential records* yang kini digunakan di Negara Amerika Serikat, menggantikan istilah *presidential paper* semenjak disahkannya *The Presidential Records Act* pada 1981. (Montgomery, 2003) Arsip kepresidenan adalah arsip dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang berkaitan dengan tugas-tugas presiden dan kegiatan pribadi. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022) Figur Presiden di Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

pemerintahan. Arsip yang dihasilkan dari kegiatan dari para Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan memiliki nilai memori kolektif bangsa karena kebijakan yang dihasilkan oleh presiden memiliki dampak dalam skala nasional. Oleh karena itu penyelamatan arsip kepresidenan memiliki urgensi yang tinggi karena merupakan bagian penting dari rekaman sejarah perjalanan bangsa. Di samping itu arsip kepresidenan dapat berkontribusi sebagai referensi dan pembelajaran di masa yang akan datang.

Pada Tahun Anggaran 2022, ANRI mengesahkan unit Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) sebagai upaya dalam menjamin terselamatkannya dan terlestarikannya arsip kepresidenan sebagai warisan budaya, serta menyediakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat untuk memahami masa lampau bangsanya dan pemimpinnya. *Provenance* dari arsip statis kepresidenan yang tersimpan di ANRI terdiri atas Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kabinet Perdana Menteri, Pidato Presiden, Sekretariat Militer, Kementrian Pertahanan, Pusat Produksi Film Negara, K.H. Abdurrahman Wahid dan lain sebagainya. Meskipun demikian masih terdapat ketidakseimbangan kuantitas arsip statis kepresidenan dari periode Bacharudin Jusuf Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemetaan *provenance* arsip kepresidenan yang belum memenuhi konsepsi, data arsip kepresidenan yang belum menyeluruh dan minimnya arsip kepresidenan pada era reformasi merupakan tantangan bagi unit Pusdipres. Permasalahan lain yang diobservasi adalah belum tersedianya informasi yang komprehensif mengenai seorang presiden atau wakil presiden. Berlandaskan kepada konsiderasi di atas, maka dibutuhkan strategi khusus untuk mengelola arsip statis kepresidenan secara komprehensif sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi para pengguna arsip. Diharapkan dengan pengelolaan arsip kepresidenan yang komprehensif di Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan atau *role model* bagi pengelolaan arsip ke gubernuran, ke kabupaten, dan lain sebagainya sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai kebijakan di masa yang akan depan.

2. Gambaran Umum

Pusdipres merupakan Unit Eselon II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.(Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022) Pembentukan unit ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.(Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022) Pada Pasal 87 diamanatkan bahwa fungsi substantif dari Pusdipres terdiri dari akuisisi, pengolahan, dan pemanfaatan arsip statis kepresidenan.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Konsep arsip kepresidenan yang diterapkan di Indonesia adalah arsip yang dibuat dan diterima oleh presiden mulai dari lahir hingga wafat. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022) Berdasarkan hasil penelusuran sementara yang dilakukan melalui observasi sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*), maka diperoleh data sebagai berikut:

- Dua *guide* arsip statis dengan tema Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto;
- Daftar Arsip Pidato Presiden Sukarno 1958-1967;
- Daftar Arsip Foto IPPHOS;
- Daftar arsip Sekretariat Negara: Produk Hukum;
- Daftar Arsip film Pusat Produksi Film Negara: Siaran Khusus;
- Daftar Arsip film Pusat Produksi Film Negara: Gelora Pembangunan;
- Daftar Arsip film Pusat Produksi Film Negara: Gelora Indonesia;
- Daftar arsip video Kementerian Sekretariat Negara;
- Daftar Arsip Statis Tekstual Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (SETKAB RI) Seri Produk Hukum Tahun;
- Daftar Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa;
- Daftar Arsip Foto *Rijks Voorlichtings Dienst* (RVD);
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara Seri Pidato Presiden Soeharto;
- Inventaris Bacharuddin Jusuf Habibie;
- Inventaris Arsip Foto Abdurrahman Wahid;
- Inventaris Andi Makmur Makka;
- Inventaris arsip Sekretariat Negara: Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik;
- Inventaris foto Kementerian Penerangan;
- Inventaris Arsip PT. Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN);
- Inventaris Arsip PT Dua Satu Tiga Puluh;
- Inventaris Arsip Foto PT Dua Satu Tiga Puluh; dan
- Inventaris Arsip Badan Penyelamatan Perbankan Nasional.

3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana konsep mengenai arsip Kepresidenan di luar negeri?
- b) Bagaimana pelaksanaan dari kegiatan penyelamatan arsip statis Kepresidenan?
- c) Bagaimana proses pengelolaan arsip statis kepresidenan menjadi informasi?

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai mampu membangun realitas sosial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sebuah

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

fenomena.(Murdiyanto, 2020) Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah observasi, penelaahan dokumen dan penelusuran sumber referensi.

PEMBAHASAN

1. Konsep Arsip Kepresidenan

Arsip kepresidenan memiliki peranan yang krusial dalam sejarah perjalanan bangsa. Nilai memori kolektif nasional yang terdapat pada arsip kepresidenan berkonsekuensi untuk dilakukan penyelamatan. Diversifikasi mengenai konsep arsip kepresidenan merupakan konsekuensi dari kebijakan pengelolaan arsip kepresidenan yang diambil oleh setiap negara. Pada sub bab ini akan membahas mengenai konsep arsip Kepresidenan di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia.

Konsep dari arsip kepresidenan yang diterapkan di *National Archives and Records Administration* (NARA), Amerika Serikat adalah bahan dokumenter baik secara menyeluruh atau parsial yang diciptakan atau diterima oleh presiden, staf presiden, atau unit atau individual dari kantor eksekutif presiden yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberi masukan, membantu kegiatan presiden menjalankan tugasnya.(S. Ferreiro, 2020) Arsip kepresidenan dapat dalam media tekstual, audio-visual dan elektronik. Konsep ini diamanatkan dalam *The Presidential Records Act* Tahun 1978. Dari definisi di atas, maka konsep dari arsip kepresidenan adalah arsip presiden yang dihasilkan selama menjabat sebagai presiden. NARA telah mengidentifikasi *provenance* yang terkait dengan arsip kepresidenan, baik tingkat nasional ataupun federal.

Konsep arsip kepresidenan (*presidential records*) yang diterapkan di Arsip Nasional Korea Selatan (NAoK) adalah arsip dan benda yang disimpan oleh institusi-institusi tertentu pasca dibuat dan diterima dalam menjalankan tugas sebagai presiden (termasuk pelaksana tugas presiden seperti yang diamanatkan dalam Pasal 71 Konstitusi Republik Korea dan Presiden terpilih yang ditentukan dalam Pasal 67 Konstitusi Republik Korea dan Pasal 187 Undang-Undang Pemilihan Pejabat Umum; selanjutnya berlaku hal yang sama).(KLRI, 2020) Pengelolaan arsip kepresidenan di NAoK dilaksanakan berdasarkan *Act on the Management of Presidential Archives*.

Konsep arsip kepresidenan (*presidential papers*) yang diterapkan di Brazil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8394 Tahun 1991 adalah dokumentasi yang tercipta ketika presiden terpilih melalui proses yang bernama *diplomação*.(Heymann & Moreli, 2021) Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa arsip, bibliografi, dan kebendaan; baik yang diciptakan, diterima terlepas dari kondisi kustodian.(KLRI, 2020)

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Berdasarkan definisi di atas, dapat diargumentasikan bahwa Korea Selatan dan Brazil memiliki kebijakan arsip kepresidenan dengan konsep GLAM atau *Gallery, Library, Archives and Museum*. Deliniasi waktu dari ketiga negara adalah pada masa menjabat sebagai presiden.

Penetapan terkait arsip kepresidenan di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2022. Istilah yang digunakan pada ANRI adalah arsip statis kepresidenan. Berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan, spektrum arsip kepresidenan meliputi arsip perseorangan dari presiden mulai dari lahir sampai dengan tutup usia dan juga arsip yang diciptakan atau diterima pada saat menjabat sebagai seorang presiden presiden. Dari konsep yang dideliniaskan, maka dapat diargumentasikan bahwa konsep dari arsip statis kepresidenan yang diterapkan merupakan kolaborasi dari arsip perseorangan dengan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam fasilitasi kegiatan kepresidenan.

Deliniasi arsip statis kepresidenan di Indonesia belum melibatkan tugas dan fungsi dari wakil presiden. Wakil presiden memiliki peranan yang sangat krusial dalam pemerintahan Indonesia. Pemikiran, kebijakan dan kegiatan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi dari wakil presiden serta memiliki nilai memori kolektif bangsa. Diharapkan dengan penambahan spektrum wakil presiden ke dalam kebijakan dari arsip statis kepresidenan, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem presidensial yang lebih komprehensif.

Arsip kepresidenan mengenalkan kita untuk memahami presiden/ wakil presiden sebagai individual dan juga sebagai institusi. Di samping itu, arsip statis kepresidenan di Indonesia dapat memberikan informasi mengenai seorang presiden/ wakil presiden. Misalnya, mengenai konsep pemikiran kebijakan yang kemungkinan dapat berasal dari riwayat pendidikan ataupun berorganisasi. Meskipun demikian, beberapa tantangan ditemui dalam pengelolaan arsip statis kepresidenan di Indonesia.

2. Penyelamatan Arsip Statis Kepresidenan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi arsip yang oleh Pusdipres pada Tahun Anggaran 2023 belum memiliki Standar Operasi Prosedur – Aparatur Pemerintahan (SOP-AP).

Database arsip kepresidenan adalah output dari kegiatan identifikasi arsip kepresidenan. Kegiatan ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan arsip kepresidenan yang meliputi akuisisi, Pengolahan, preservasi serta layanan dan pemanfaatan. Kegiatan identifikasi diselenggarakan secara keberlanjutan hingga diperoleh data yang komprehensif.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan identifikasi arsip kepresidenan, yaitu:

- a) Riset kegiatan presiden
Kegiatan ataupun peristiwa dari perjalanan hidup dari presiden adalah elemen krusial untuk dilakukan penelusuran. Tahapan ini adalah tahapan awal untuk memetakan arsip yang dihasilkan oleh Presiden. Di samping itu, kegiatan peristiwa nasional yang terjadi selama menjabat juga merupakan elemen dalam penelusuran. Data riset ini dibagi ke dalam skema pengaturan informasi pra jabatan, masa menjabat, dan pasca menjabat. **(Lihat Gambar 1)**
- b) Identifikasi *provenance* arsip
Dari data kronik presiden yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya, dilakukan analisis tugas dan fungsi untuk menentukan *provenance* arsip yang dihasilkan. Setelah penentuan *provenance*, Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi keberadaan dari arsip tersebut. Berdasarkan tahapan ini, diperoleh informasi belum lengkapnya arsip kebijakan presiden, minimnya arsip mengenai prestasi presiden, arsip perseorangan presiden pada masa pra dan pasca menjabat, arsip kepresidenan yang terdapat di luar negeri, misalnya Arsip Nasional Belanda. **(Lihat Gambar 2)**
- c) Verifikasi internal
Tahapan verifikasi data secara internal adalah tahapan untuk memeriksa kembali data yang dihasilkan. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan valid.

Penyelamatan arsip kepresidenan perlu dilakukan agar terwujudnya arsip yang andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Data yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi arsip statis kepresidenan, digunakan untuk pelayanan dan pemanfaatan arsip melalui kegiatan digitalisasi. Pemetaan *provenance* arsip kepresidenan yang belum terdapat di ANRI, dapat berkontribusi sebagai strategi penyelamatan arsip kepresidenan. **(Lihat Gambar 3)**

Kyabo dan Mnjama (2012) berargumen bahwa terdapat empat strategi utama dalam penyelamatan arsip kepresidenan, yaitu:

- Donasi (untuk arsip perseorangan);
- Akusisi (untuk arsip badan public, seperti yang diwajibkan oleh peraturan);
- Pembelian; dan

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

- Negosiasi (untuk arsip presiden yang dimiliki oleh keluarganya).(Kiyabo & Mnjama, 2012)

Melalui penyelamatan arsip kepresidenan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena arsip tersebut merepresentasikan proses dalam pengambilan keputusan.(Kwak, 2019)

3. Pengelolaan Arsip Statis Kepresidenan

Pengelolaan Arsip Statis (PAS) dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti yang diamanatkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada Pasal 59 mengamanatkan bahwa PAS terdiri atas akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan dan pemanfaatan.

Pengolahan adalah proses pemetaan, analisis, dan pendokumentasian arsip untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis untuk mendukung akses, preservasi dan aktivitas pengelolaan yang lainnya.(Crockett, 2016) Kegiatan Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan kaidah *provenance* (asal-usul) dan *original order* (aturan asli) seperti yang diamanatkan oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam upaya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam menuangkan arsip foto kepresidenan, maka *crowdsourcing*(Whitla, 2009) dapat diterapkan baik pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau *website* Pusdipres yang sedang dalam proses penyusunan. Dengan strategi *crowdsourcing*, publik diharapkan dapat menginformasikan mengenai keberadaan arsip statis kepresidenan yang belum terdapat di ANRI. Arsip Nasional Kanada telah menerapkan *crowdsourcing* dengan Program Co-Lab.(Canada, 2024) **(Lihat Gambar 4)** Meskipun demikian perlu dilakukan verifikasi kembali atas informasi yang diperoleh dari *crowdsourcing*.

Layanan dan pemanfaatan arsip statis kepresidenan merupakan tahapan akhir dari PAS kepresidenan. Melalui kegiatan ini publik dapat memperoleh arsip statis kepresidenan yang telah diolah dan dialihmedia. Diseminasi informasi dari arsip statis kepresidenan dapat divisualisasikan secara kronologis dengan mengacu kepada data hasil identifikasi arsip statis. Tampilan diseminasi arsip ini mengadopsi dari laman wikisource. **(Lihat Gambar 5)** Dengan adanya kemudahan dalam mengakses arsip kepresidenan diharapkan dapat meningkatkan studi riset mengenai kepresidenan.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

BAB III. PENUTUP

Arsip kepresidenan memiliki nilai memori kolektif bangsa yang krusial untuk diselamatkan dan dikelola informasinya. Penanganan dan konsep arsip kepresidenan yang berbeda dari negara ke negara lain disebabkan oleh diversifikasi kebijakan yang diambil oleh setiap negara. Konsep arsip statis kepresidenan yang diterapkan oleh Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah kombinasi arsip presiden sebagai perseorangan dan arsip presiden sebagai representasi pemerintahan tertinggi. Belum optimalnya mengenai data arsip kepresidenan, memerlukan kegiatan identifikasi arsip statis kepresidenan yang komprehensif dan berkeberlanjutan. Data arsip statis kepresidenan kemudian dikelola melalui kegiatan pengelolaan arsip statis. *Crowdsourcing* dan penyajian data arsip statis di kepresidenan baik pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) ataupun laman Pusat Studi Arsip Kepresidenan dapat memudahkan public dalam menyelamatkan dan memperoleh arsip statis kepresidenan secara *real-time* sehingga dapat berkontribusi dalam memfasilitasi studi mengenai kepresidenan.

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia, A. N. R. I. (2022). *NASKAH AKADEMIK: PERUBAHAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA*.
<https://jdih.anri.go.id/storage/rules/January2026/QUN3nJ3atBFrj5zw92JC.pdf>
- Canada, L. and A. (2024). *Contribute with Co-Lab*. <https://colab.bac-lac.gc.ca/eng>
- Crockett, M. (2016). *The No-Nonsense Guide to Archives and Recordkeeping*. Facet Publishing.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15332748.2017.1399961>
- Currents of archival thinking*. (2010). Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited.
<http://archive.org/details/currentsofarchiv0000unse>
- Heymann, L., & Moreli, A. (2021). Lula's Prison Letters and the Brazilian Presidential Papers: Archives, Readings, and Uses. *The American Historical Review*, 126(4), 1520–1534. <https://doi.org/10.1093/ahr/rhab535>
- Indonesia, P. (2009). *JDIH ANRI - Undang-Undang No 43 Tahun 2009*. JDIH ANRI.
<https://jdih.anri.go.id>
- Kiyabo, H. K., & Mnjama, N. (2012). Managing presidential records and archives in Tanzania. *Archives and Manuscripts*, 40(2), 84–97.
<https://doi.org/10.1080/01576895.2012.712828>
- KLRI, K. (2020). *Statutes of the Republic of Korea*.
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=55229&type=part&key=4
- Kwak, K. (2019). A Study on the Participatory Government's Presidential Archives: Focusing on Re-organization of Records and Archives. *The Korean Journal of Archival Studies*, (61), 5–29. <https://doi.org/10.20923/kjas.2019.61.005>
- Montgomery, B. (2003). Presidential Materials: Politics and the Presidential Records Act. *The American Archivist*, 66(1), 102–138.
<https://doi.org/10.17723/aarc.66.1.8v8063806411716t>
- Muller, S. (1968). *Manual for the arrangement and description of archives;: Samuel Muller : Free Download, Borrow, and Streaming*. Internet Archive.
<https://archive.org/details/manualforarrange0000samu>
- Murdiyanto, E. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
<http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>
- S. Ferreiro, D. (2020). Guidance on Presidential Records from the National Archives and Records Administration—2020. *The National Archives and Records Administration (NARA)*, 1–12.
- Whitla, P. (2009). (PDF) *Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities*.
https://www.researchgate.net/publication/228435582_Crowdsourcing_and_Its_Application_in_Marketing_Activities

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

LAMPIRAN

No	Kurun Waktu (ddmmyyyy)	Peristiwa	Periode	Peranan	Arsip	Provenance	Lokasi Provenance	Daftar Inventaris	No Arsip
1	20/01/1928	Lahir	Pre						
2		Menerima pendidikan Sekolah Dasar di Euroestische Lagere School (E.L.S.) Makassar		Siswa	Isiah, Buku Hutan, Raport	Indralaga	Jakarta		
3		Menerima pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Hoogere Burger School)		Siswa	Isiah	TB	Bandung		
4	1950	Pindah ke Bandung dan melanjutkan sekolah di Hoogere Burger School							
5	1951 - 1954	Menerima pendidikan Masa Sekolah Menengah Atas Kristen di Jalan Cikap, Bandung		Siswa	Isiah				
6	1954 - 1955	Menerima pendidikan di Departemen Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Sekarang Institut Teknologi Bandung), namun tidak selesai		Mahasiswa	Raport				Presiden
7	1955 - 1955	Menerima pendidikan di Institut Tekhnische Technische Hogeschool (IOTHT), Aachen, Jerman (Dipindah ke ITB)		Mahasiswa	Isiah, hasil penelitian				
8	1957	Ditunjuk sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aachen		Mahasiswa	Surat pengangkatan	PPI Aachen	Aachen, Jerman		
9	Juli 1959	Dinasai di Rumah Sani Kain Wassenaar. Pada saat ini berumpah akan mendirikan agensi keuangan di di lingkungan IOTHT		Mahasiswa					
10	1960	Menerima Diploma Insinyur pada Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang di Universitas Aachen, Fakultas Teknik Mesin, Jerman Barat		Mahasiswa	Isiah				
11	1960	Beraja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi Ringan IOTHT							
12	12/05/1962	Menantan dengan Hani Anun Besari di Bandung		Suami	Ada pernikahan				
13	10 Mei 1963	Kabupaten Pura Perdana yang bernama Iman Albar Habibie							
14	1965	Membentek Gelar Doktor di Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang di Universitas Aachen, Fakultas Teknik Mesin, Jerman Barat		Mahasiswa	Isiah				
15	1968-1973	Datang menjadi Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut Naga dan Mitra di Messerschmitt-Bölkow-Born (MBB) sekarang menjadi Airbus Group			Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut Naga dan Mitra	Surat pengangkatan	Airbus Group	Jerman	
16	1973	Menantan pernikahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos untuk membangun industri pesawat terbang di Filipina							Presiden

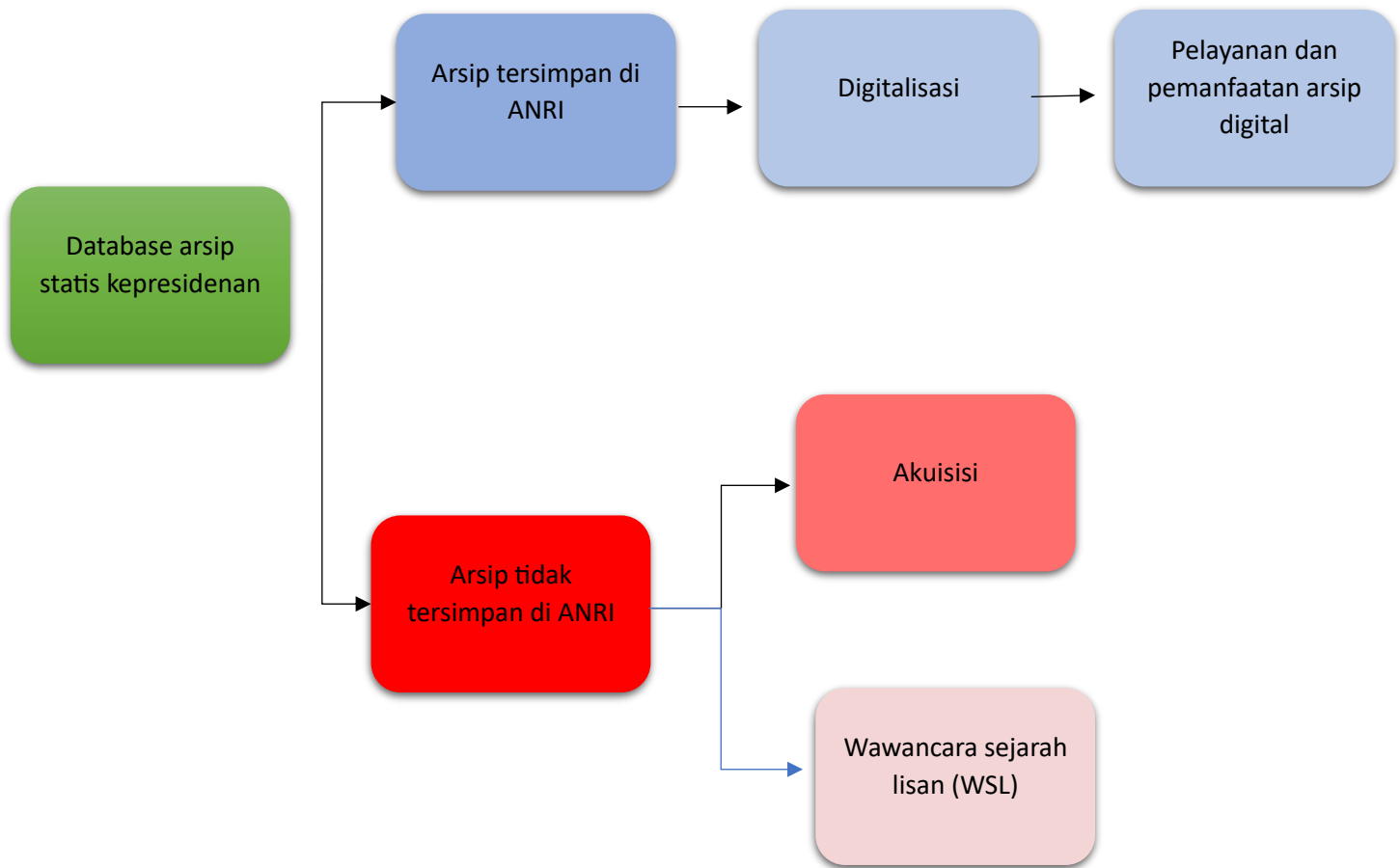
Gambar 1. Tabel elemen riset kronik Presiden B.J. Habibie
(Dok. Octavia S, 2 April 2023)

No	Kurun Waktu (ddmmyyyy)	Peristiwa	Periode	Peranan	Arsip	Provenance	Lokasi Provenance	Daftar Inventaris	No Arsip
72	1994	Menerima penghargaan dari Negara Taiwan The Order of Brilliant Star with Grand Cordons			Berikat		Taiwan		
73	1995	Menerima Penghargaan Honorary Fellow of the Academy of Engineers Australia							
74	1995 - 1998	Datang menjadi Kepala Tim Proyek Implementasi Lapangan Gas Natuna			Keputusan Presiden No 14 Tahun 1995				
75	1995 - 1998	Datang menjadi Kepala Forum Kerjasama Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan							
76	07/02/1999	Berangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Kasab RPT) dalam Tim Nasional Pasca Konferensi Asia-Eropa pada 6 - 7 Februari 1999 di Singapura yang berjudul "The Application of A Strong Advanced Technology Policy to Address National Security and Economic Development"		Menteri Riset dan Teknologi	Arsip sesuai di foto	PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP)	JARI	Inventaris Arsip Teleskop PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) (1995) 1999 - 1999	54
77	01/10/1999	Menantan sebagai perantara kerja sama antara PT DSTP dengan PT IPTN		Direktur Utama PT Institut Pasawat Terbang Nuklir sekarang PT Dirgantara Indonesia (Peransi)	Arsip sesuai di foto	PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP)	JARI	Inventaris Arsip Teleskop PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) 1995 - 1999 - 1999 Inventaris Arsip Foto PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) 1995 - 1999	Inventaris Arsip PT DSTP-Asip Teleskop (1995) 1999-1999 atau Nomor 52 Inventaris Arsip Foto PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) 1995 - 1999 Nomor 236 - 308
78	20 November 1997	Menerima sertifikat dari Direktur Solar Turbine Internasional, Oen Barton		Direktur Utama PT Institut Pasawat Terbang Nuklir sekarang PT Dirgantara Indonesia (Peransi)	Berikat, Foto	PT IPTN Personal archives B. Habibie	Bandung Jakarta		Presiden
79	1997	Menerima penghargaan dari Negara Perancis Grand Officer de la Legion d'Honneur					Perancis		
80	1997	Menerima penghargaan Academicien of the Russian Academy of Aeronautics							
81	22/01/1998	Pengangkatan sebagai program N-2130 sesuai arahan komisi utama PT DSTP Tika Saebarto		Direktur Utama PT Institut Pasawat Terbang Nuklir sekarang PT Dirgantara Indonesia (Peransi)	Surat dari Direktur Utama PT DSTP Tika Saebarto Murad Kepala Direktur Utama PT IPTN Berjudul: "Jual/Habibie mengenai pengangkatan program N-2130 sesuai arahan komisi utama PT DSTP Tika Saebarto"	PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP)	JARI	Inventaris Arsip Teleskop PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) (1995) 1999 - 1999	67
82	11/03/1998	Ditunjuk menjadi Wakil Presiden ke-7 Indonesia memepan Soeharto melalui Bidang Urutan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)		Wakil Presiden					
83	12/03/1998	Menerima penghargaan Bintang Mahatma Utama, Jakarta							
84	12/03/1998	Menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana, Jakarta							
85	20/04/1998	Mengembalikan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998 tentang Provinsi Dumbo, Dayak, Irian							

Gambar 2. Analisis provenance dari kegiatan Presiden B.J. Habibie pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. IPTN
(Dok. Octavia S, 2 April 2023)

DOI:

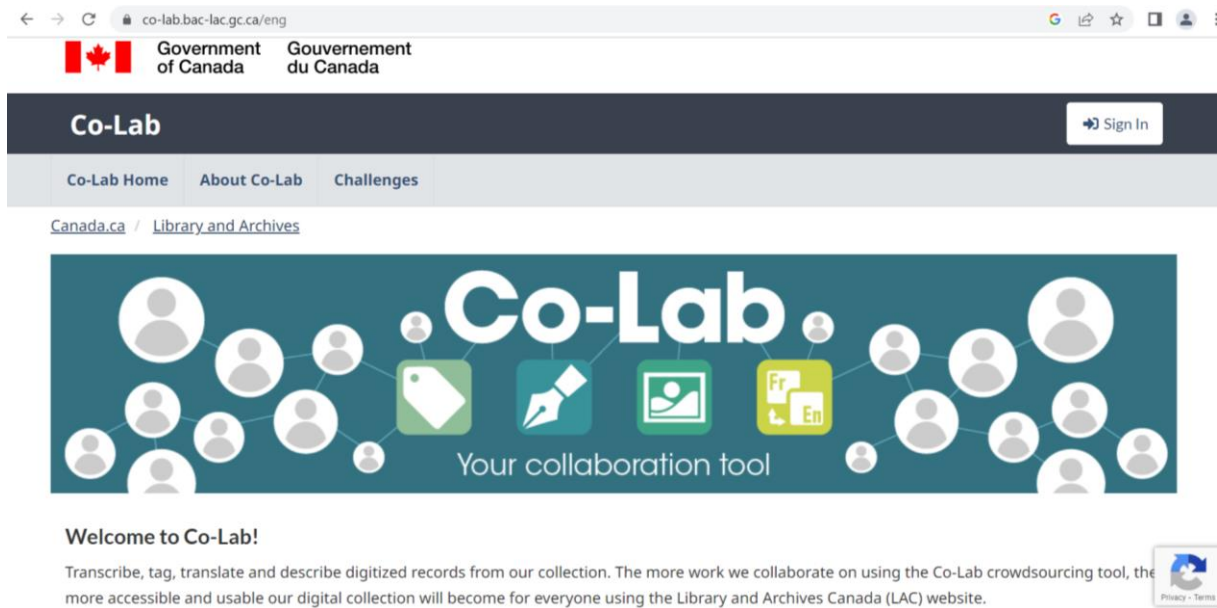
© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Gambar 3. Strategi penyelamatan dan pelayanan arsip statis kepresidenan

DOI:

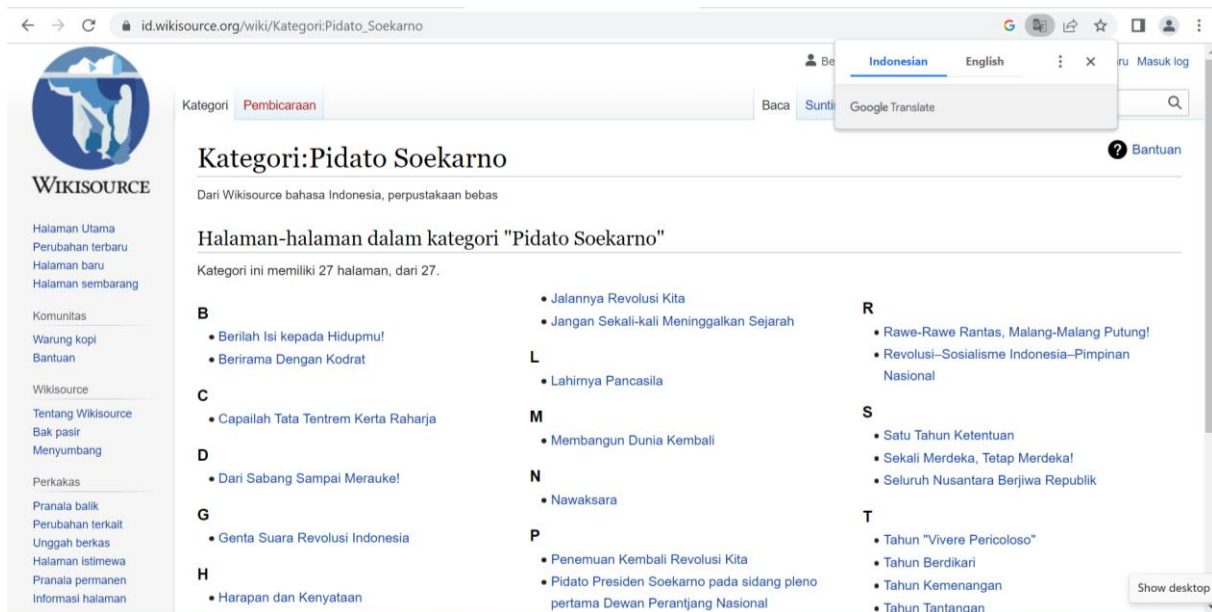
© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Gambar 4. Penerapan crowdsourcing di Arsip Nasional Canada
<https://co-lab.bac-lac.gc.ca/eng>

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Gambar 5. Tampilan Pidato Presiden Sukarno yang disusun secara alfabetis
[https://id.wikisource.org/wiki/Kategori:Pidato Soekarno](https://id.wikisource.org/wiki/Kategori:Pidato_Soekarno)

DOI:

© 2024 The Author(s). Published by (Institution). This is an open access article under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)